

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN PENGARUHNYA TERHADAP ARSITEKTUR BALI

Rachmat Budihardjo

Jurusan Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRAK. Membicarakan sistem pemerintahan kerajaan di Bali, tidak bisa dilepaskan oleh adanya pengaruh agama Hindu. Konsep Negara Klasik di Indonesia dipengaruhi oleh dua pusat peradaban yaitu India dan Cina, khususnya mengenai masalah kosmis-magis, angka-angka, benda keramat, para pemimpin, geografi, posisi dan lain-lain. Sistem pemerintahan kerajaan di Bali berawal dari sejak zaman Bali Kuno sampai dengan zaman Awal Kemerdekaan. Puncak kejayaannya terjadi pada zaman Majapahit atau setelah adanya ekspedisi patih Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali. Pengaruh agama Hindu, terutama setelah kedatangan Pendeta dari Jawa Timur : Empu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha / Dang Hyang Dwijendra sangat mendominasi pada perkembangan dan perbaikan segi-segi kehidupan dan sistem pemerintahan kerajaan di Bali, termasuk perkembangan arsitekturnya baik pada jenis bangunan Parahyangan, Pawongan ataupun Palemahan. Pada mulanya keraton di Bali disebut dengan "Pura" seperti : Linggarsa Pura (Samprangan, Gianyar), Sweca Pura (Gelgel) dan Semara Pura (Klungkung), setelah beberapa generasi kekuasaan di Klungkung dilakukanlah perubahan sebutan : Pura untuk fungsi bangunan Kahyangan / Suci dan Puri untuk fungsi bangunan Pawongan / Keraton.

Kata Kunci: sistem pemerintahan, kerajaan, arsitektur Bali

ABSTRACT.

Talking about the royal government system in Bali, it cannot be separated by the influence of Hindu religion. The concept of classic country in Indonesia had been affected by the two centers of civilization, namely Indian and China, particularly on the issue of cosmic-magical, numbers and figures, sacred objects, leaders, geography, and other positions. System of royal government in Bali had began from the days of the Ancient Bali to Early Independence era. The peak of the victory had occurred at the era of Majapahit after the expedition of Gajah Mada in conquering Bali. Influence of Hindu religion, especially after the arrival of Reverend from East Java: Empu Kuturan and Dang Hyang Nirartha / Dang Hyang Dwijendra was very dominating on the development and improvement of aspect of

life and system of royal government in Bali. The influence also affected the development of architecture in both building types Parahyangan, Pawongan or Palemahan. At early time, mostly palaces in Bali have called "Pura" such as: Linggarsa Pura (Samprangan, Gianyar), Sweca Pura (Gelgel) and Semara Pura (Klungkung), after several generations of power in Klungkung have undertaken designation change: Pura for building which has a function as a sacred place/ Kahyangan and Puri for building which has function for Pawongan building/ palace.

Keywords: system of government, royal, architecture of Bali

KONSEP NEGARA KLASIK DI INDONESIA

Negara Klasik yang dimaksud disini adalah merupakan suatu Pemerintahan Negara dalam bentuk Kerajaan yang pernah ada dan berkembang di Indonesia pada masa sebelum Kemerdekaan tahun 1945. Apa yang dinamakan dengan negara klasik atau meminjam istilah yang dikemukakan Clifford Geertz yang menyebutkan dengan istilah *Indic* (berkenaan dengan India) atau *Indianized*, adalah menjadikan India dalam penampilan, adat atau sifat, atau Hindu-Budhis dari segi agama yang dianut merupakan ciri-ciri yang mendominasi perwujudan negara-negara kerajaan di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Konsep Negara Klasik di Asia Tenggara dan Indonesia dipengaruhi oleh dua pusat peradaban yaitu India dan Cina (Onghokham, 1989 : 11-14), khususnya mengenai masalah kosmis-magis, angka-angka, benda keramat, para pemimpin, geografi, posisi dan lain-lain. Pengaruhnya sedemikian kuat, mendominasi Sejarah Indonesia, sejak abad pertama sampai dengan abad ke lima belas.

Pengaruh India di Indonesia terlihat pada bentuk prasasti yang banyak mengadopsi versi huruf dan bahasa Sansekerta, konsepsi *Deva-Raja*, bentuk & pola kerajaan dan lain-lain. Sedangkan peradaban Cina yang bersifat sekuler dengan sistem birokrasi dari peradabannya dalam arti tradisi agung (*great tradition*) hanya dapat tertanam melalui penaklukan suatu daerah di Asia Tenggara, seperti Vietnam.

Pengertian negara dalam negara-negara klasik di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) sangat berbeda dengan konsep negara yang berkembang di Eropa pada abad ke-17, terutama di Perancis pada masa pemerintahan Raja Louis ke-XIV yang menggunakan istilah *L'etat*, yang mengatakan negara adalah saya. Negara di kepulauan Indonesia tidak

mengenal wilayah, istilah negara juga dapat berarti kota-keraton atau ibukota negara dalam arti kesatuan politik (*polity*) adalah sama dengan masyarakat. Sedangkan di Eropa sendiri masyarakat terdiri dari golongan-golongan rohaniawan, ksatria ataupun bangsawan (*nobility*) dan golongan ke-tiga (borjuasi kota), masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diformulasikan dalam Undang-Undang dan diperlakukan sebagai hak milik zaman negara modern pada abad kini.

Susunan pemerintahan negara kerajaan di Jawa (Hindu) mempunyai konsep yang sederhana dan berlangsung lama dengan pola yang umum sampai memasuki masa penjajahan. Di bawah Keraton terdapat dua tingkat pemerintahan yakni *Wanua* atau desa yang merupakan tingkatan paling bawah / terendah dan *Watek* atau sekelompok desa yang merupakan tingkatan menengah (Jan Wisseman Christie, 1989 : 1-31). Ke-dua istilah ini dapat diterjemahkan sebagai kelompok (grup) dan tampaknya berlaku baik untuk semua unit maupun wilayah (teritori) penduduk. *Wanua* secara epigrafis merupakan unit ekonomis dan politis terkecil yang dapat dilihat pada dataran rendah di Jawa. *Wanua* merupakan bangunan dasar negara pada akhir tahun seribuan pertama. Walaupun desa merupakan tingkat paling rendah dalam masyarakat luas yang bertingkat-tingkat, desa itu sendiri di dalamnya juga bertingkat-tingkat. Berbagai pengelompokan yang mempunyai peringkat tertentu terdapat di dalam unit ini. Badan yang berwenang terdiri dari kelompok orang terkemuka atau sesepuh masyarakat. Tidak jelas apakah status ini diperoleh dari keturunan, kepemilikan, kekayaan atau seperti yang terjadi di Bali pada waktu itu yang berdasarkan pada kedudukan sebagai kepala rumah tangga (*kuren*)

Dalam cakupan bidang ekonomi, negara-negara dalam bentuk kerajaan mengandalkan pada sawah ataupun ladang terutama yang menghasilkan beras. Beras adalah merupakan bahan pangan utama dan sawah adalah merupakan suatu wujud yang dapat menghasilkan pajak terpenting di dataran rendah. Pada daerah pinggiran (marginal), *gaga* atau sawah kering memberikan kira-kira sepertiga dari penerimaan pajak pertanian.

Kepemimpinan Tradisional

Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya, yaitu kelompok yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan kelompok yang dipimpin sebagai kelompok terbesar dari orang kebanyakan. Status pemimpin di dalam struktur sosial masyarakatnya membawa fungsi atau peranan untuk menguasai, mengatur, dan mengawasi agar tujuan kolektif tercapai dan terjaga nilai-nilai sosio-kultural masyarakatnya.

Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan dan pengaruh bersumber pada prinsip kekuasaan yang keramat, yaitu kharisma. Otoritas tradisional lazimnya juga diterima oleh masyarakat tanpa mempersoalkan legitimasinya. Kekuasaan berkaitan dengan sistem kepercayaan, sebab nilai-nilai yang berfungsi untuk mempertahankan masyarakat bersumber pada sistem tersebut. Perwujudan Orde sosial sebagai sub orde dari orde kosmis-magis berdasarkan prinsip-prinsip religius dan kekuasaan yang bersumber pada kekuatan supranatural.

Penguasa atau pemimpin memegang kekuasaan yang dualistik baik yang duniawi (jasmaniah) maupun yang rohaniah. Ke-duanya manunggal pada satu tangan, seperti yang terjadi bahwa seorang raja memegang kekuasaan duniawi dan yang lain kekuasaan rohani, atau kelembagaan Raja-Pendeta. Setiap pembentukan kekuasaan baru dalam masyarakat tradisional memerlukan mitologisasi kekuasaan untuk membenarkan eksistensinya di mata kelompok atau lingkungan pengikut. Kepercayaan atau mitos tentang prinsip kharismatis itu dapat dipandang sebagai kontra ideologi yang mempunyai fungsi instrumental dalam perjuangan kekuasaan. Pendiri dinasti baru memerlukan pula suatu legitimasi bagi kedudukan yang diperolehnya.

Hubungan Pemimpin (Raja) dan Rakyat

Ikatan sosial antara para pemimpin dan pengikut dalam kelompok ini disebut dengan ikatan personalistik yang berarti kesetiaan seseorang pengikut kepada seseorang pemimpin tertentu jauh melebihi kesetiannya kepada sebuah kelompok. Susunannya dalam arti tertentu dapat berubah-ubah dan bisa juga menjadi bubar jika pemimpinnya meninggal atau tidak efektif lagi (Shelly Errington, 1989 : 92). Para pemimpin dipandang memiliki suatu kualitas yang khusus, yang di dalamnya orang lain dapat juga memiliki kekhususan itu dengan cara mengabdikan kepada para pemimpin dan dengan menjalin hubungan yang erat dengan mereka.

Bentuk hubungan sosial politik pada negara kerajaan lebih menyerupai sebuah gunung atau kerucut yang memiliki puncak dan pusat yang ditentukan sang Penguasa. Raja dan Pangerannya merupakan sumber maupun pengatur status. Di satu pihak mereka secara fisik menghasilkan status mereka sendiri yang tinggi, serta tingkat status untuk anak-anak mereka yang merupakan hasil perkawinan dengan seorang wanita bangsawan yang tinggi. Di lain pihak mereka membagi tanda legitimasi seperti : gelar, kedudukan, jubah, senjata dan tanda kehormatan serta keuntungan lainnya.

Ada hubungan antara Penguasa dan ketentraman masyarakat, namun mengapa betapa besarnya kekuasaan seorang penguasa (Raja) juga terdapat keresahan di masyarakat ? Hal ini dapat terjadi karena adanya masalah *impermanence* yang berkaitan dengan ketidak stabilan dan ketidak abadian kekuasaan seseorang. Pada sisi yang lain bahwa konsepsi kekuasaan tradisional dapat dipupuk terus menerus sampai mencapai puncaknya, tetapi setelah mencapai puncak akhirnya kekuasaan tersebut juga akan mengalami surut dan penurunan (B.R.Anderson, 1972). Dalam konsepsi magi-tradisional itu karena selalu ada pemupukan kekuasaan dari rival-rival pusat kekuasaan yang sedemikian terikat pada perseorangan yang terbatas umur / usianya sebagai manusia. Dengan kata lain yang membatasi eksistensi suatu negara pada masa lampau adalah umur manusia yang menjadi pemimpinnya.

Di dalam kelompok-kelompok politik seperti itu, perbedaan yang diperankan dalam berbagai media, antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dan antara yang di dalam (dekat atau di pusat) dengan yang di luar (berada jauh dari pusat atau pinggiran) menurut sejarahnya dapat dipahami dari organisasi serta kekuasaan dan persoalan yang berkaitan dengan sosial politik. Misalnya tempat tinggal yang membatasi pusat pada kelompok elit politik di Jawa Tengah dan Bali disebut bagian "Dalam" dibaca *Ndalem* atau *Jero*. Di Bali inti bagian dalam garis keturunan raja sering diacu sebagai dalam yang disebut *puri agung* atau *puri gede*, sedangkan rumah-rumah tambahan dari kediaman raja disebut *jero*, suatu kata yang berarti bagian dalam ataupun di dalam. Jika status kekerabatan diungkapkan menurut pengaturan tempat, tidaklah mengherankan bahwa istilah-istilah mengenai tempat, menunjukkan status dan menjelaskan tatanan sosial. Secara singkat dapat digambarkan bahwa dimana orang-orang tersebut di tempatkan adalah merupakan suatu geografis yang ditentukan oleh pusat kekuasaan.

Kedudukan Pemimpin

Dalam masyarakat tradisional terdapat keyakinan bahwa segenap mahluk hidup berperingkat secara hirarkhis menurut relatif jauh-dekatnya dengan yang Suci / Tuhan Yang Maha Kuasa. Makin tinggi status seseorang, dalam dirinya dianggap memiliki unsur-unsur suci yang lebih banyak dari orang lain, seperti : penghargaan, pon, barami, sakti, darah putih dan lain-lain daripada yang berkedudukan lebih rendah dalam menyerap kekuatan para dewa, leluhur dan adikodrati (Lorraine Gesick, 1989 : 19). Lebih jauh lagi dikatakan bahwa kekuatan yang diperoleh itu dapat dibagikan kembali diantara pengikut mereka. Harapan untuk mendapatkan bagian atas kekuatan spiritual

sang pemimpin itulah, seperti kemakmuran dalam hidup dan kelahiran kembali (*re-inkarnasi*) yang lebih baik dalam kehidupan berikutnya merupakan hal yang menjadi daya tarik bagi pengikut terhadap pemimpin.

Adanya keyakinan bahwa makhluk hidup diperintah oleh suatu rangkaian kesatuan (*continum*) mulai dari yang bersifat kebintangan (kejam) sampai ke yang suci, dijumpai dalam perwujudan konsepsi ruang yang tak berujung pangkal. Di dalamnya terdapat pusat-pusat yang berisi kekuatan yang dianggap dapat memancarkan tenaga ke luar dan ke bawah menuju ke pinggiran yang mempunyai kekuatan. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila mereka yang berstatus lebih tinggi dijumpai pada pusat (sebenarnya di taruh pada pusat-pusat) yang dikelilingi oleh mereka-mereka yang semakin berkurang dekatnya dengan kekuasaan.

Pada semua bentang alam, istana, candi, gunung keramat dan kota-kota besar, dikelilingi dengan cara yang sama oleh pusat dan desa, baik sekunder maupun tertier. Kesemuanya itu mencerminkan kekuasaan pusat dalam berbagai tingkatan. Akhirnya jauh di pinggiran berupa tanah-tanah olahan, hutan dan barisan pegunungan serta perbukitan adalah merupakan wilayah liar (tidak bertuan), yang merupakan wilayah di luar jangkauan dari pusat kekuasaan. Wilayah ini sebenarnya sama sekali bukan tanpa daya, sebaliknya wilayah ini penuh dengan kekuasaan, tetapi sifatnya adalah anarki dan kacau balau. Hanya orang yang benar-benar memiliki kharisma yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan tersebut dengan cara meditasi dan disiplin diri. Ruang yang mantap dan beradab, seperti misalnya istana, kerajaan dan negara dianggap merupakan hasil meditasi dan kekuatan spiritual dari tokoh yang berada di pusat seperti leluhur yang sangat berkuasa, raja dan pemeliharaan tenaga spiritual secara terus menerus oleh para pemimpin (raja).

Ajaran tentang pusat pada hakekatnya merupakan sebuah teori tentang dasar kedaulatan (Geertz, 1992 : 162). Teori ini mengatakan bahwa istana dan ibukota adalah merupakan *mikrokosmos* dari suatu tatanan cerminan citra dari alam semesta (*makrokosmos*) pada skala yang lebih kecil. Istana dan ibukota itu tidak hanya merupakan inti, mesin atau poros negara, melainkan istana dan ibukota adalah negara.

SEJARAH KERAJAAN DI BALI

Perkembangan sejarah kerajaan di Bali dapat dijelaskan sejak masuknya agama Hindu yang sering di katagorikan sebagai zaman Bali Kuno, dilanjutkan pada masa Bali menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, melalui ekspedisi yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada bersama para Arya yang berhasil menaklukkan Bali. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai dasar-dasar pembentukan sistem kemasyarakatan dan kekerabatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan dalam suatu konsep negara kerajaan di Bali. Sistem pemerintahan kerajaan di Bali juga masih berlangsung sampai dengan zaman kedatangan bangsa Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia termasuk Bali dan pemerintahan kerajaan di Bali dapat dikatakan berakhir (kehilangan pamor dan legitimasinya) pada zaman Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan perkembangan pemerintahan kerajaan di Bali berdasarkan zaman atau periodesasinya.

Zaman Berkembangnya Agama Hindu

Berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia ditandai dengan datangnya bangsa India dan pengaruh Hindu. Pada abad-abad pertama masehi sampai dengan sekitar tahun 1500, yakni dengan lenyapnya kerajaan Majapahit merupakan masa-masa pengaruh Hindu, di Bali diklasifikasikan sebagai zaman Bali kuno. Dengan adanya pengaruh dari India itu, berakhirilah zaman prasejarah Indonesia karena diduplikannya keterangan tertulis yang memasukkan bangsa Indonesia ke dalam zaman sejarah. Berdasarkan keterangan yang ditemukan pada prasasti abad ke-8 Masehi dapatlah dikatakan bahwa periode sejarah Bali Kuno meliputi kurun waktu antara abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi sampai dengan datangnya ekspedisi Mahapatih Gajahmada dari Majapahit yang dapat mengalahkan Bali. Nama *Balidwipa* tidaklah merupakan nama baru, namun telah ada sejak zaman dulu. Hal ini dapat diketahui dari beberapa prasasti, diantaranya prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 913 Masehi yang menyebutkan kata "Walidwipa". Demikian pula pada prasasti Raja Jayapangus, seperti prasasti Buwahan D dan prasasti Cempaga A yang berangka tahun 1181 Masehi.

Diantara raja-raja Bali yang banyak meninggalkan keterangan tertulis yang juga menyinggung gambaran tentang susunan pemerintahan pada masa itu adalah Udayana, Jayapangus, Jayasakti dan Anak Wungsu. Dalam mengendalikan pemerintahan, raja dibantu oleh suatu Badan Penasehat Pusat. Dalam prasasti tertua 882 – 914, badan ini disebut dengan istilah "*Panglapuan*". Sejak jaman Udayana, Badan Penasehat Pusat disebut dengan istilah "Pakiran-Pakiran I Jro Makabaihan". Badan ini beranggotakan

beberapa orang Senapati dan Pendeta Siwa dan Budha. Di dalam prasasti-prasasti sebelum Raja Anak Wungsu disebut-sebut beberapa jenis seni yang ada pada waktu itu. Akan tetapi, baru pada jaman Raja Anak Wungsu, kita dapat membedakan jenis seni menjadi dua kelompok yang besar, yaitu seni Keraton dan seni rakyat. Tentu saja istilah seni Keraton, tidak berarti bahwa seni itu tertutup sama sekali bagi rakyat. Kadang-kadang seni ini dipertunjukkan kepada masyarakat di desa-desa atau dengan kata lain seni Keraton bukanlah monopoli raja-raja.

Dalam bidang agama, pengaruh jaman prasejarah terutama dari zaman megalithikum masih terasa kuat. Kepercayaan pada zaman itu dititikberatkan kepada pemujaan roh nenek moyang yang disimbolkan dalam wujud bangunan pemujaan yang disebut teras piramid atau bangunan berundak-undak. Kadang-kadang di atas bangunan ditempatkan *menhir*, yaitu tiang batu monolit sebagai simbol roh nenek moyang mereka. Pada zaman Hindu hal ini terlihat pada bangunan pura yang mirip dengan punden berundak-undak. Kepercayaan pada dewa-dewa gunung, laut dan lainnya yang berasal dari zaman sebelum masuknya Hindu tetap tercermin dalam kehidupan masyarakat pada zaman setelah masuknya agama Hindu. Pada masa permulaan hingga masa pemerintahan Raja Sri Wijaya Mahadewi tidak diketahui dengan pasti agama yang dianut pada masa itu. Hanya dapat diketahui dari nama-nama Bhiksu yang memakai unsur nama Siwa, sebagai contoh bhiksu Piwakangsiwa, bhiksu Siwanirmala, dan bhiksu Siwaprajna. Berdasarkan hal ini kemungkinan agama yang berkembang pada saat itu adalah agama Siwa. Baru pada masa pemerintahan Raja Udayana dan permaisurinya, ada dua aliran agama besar yang dipeluk oleh penduduk, yaitu agama Siwa dan agama Budha. Keterangan ini diperoleh dari prasasti-prasasti yang menyebutkan adanya *mpungku sewasogata* (Siwa-Budha) sebagai pembantu raja.

Zaman Majapahit / Ekspedisi Gajah Mada (1343-1846)

Ekspedisi Gajah Mada ke Bali dilakukan pada saat Bali diperintah oleh Kerajaan Bedahulu dengan Raja Astasura Ratna Bumi Banten dan Patih Kebo Iwa. Dengan terlebih dahulu membunuh Kebo Iwa, Gajah Mada memimpin ekspedisi bersama panglima Arya Damar dengan dibantu oleh beberapa orang Arya lainnya. Penyerangan ini berakibat terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan Kerajaan Bedahulu. Pertempuran ini mengakibatkan Raja Bedahulu dan putranya wafat. Setelah menyerah, terjadilah kekosongan pemerintahan di Bali. Untuk itu, Majapahit menunjuk Sri Kresna Kepakisan memimpin pemerintahan di Bali dengan pertimbangan bahwa Sri Kresna Kepakisan

mempunyai hubungan darah dengan penduduk Bali Aga. Dari sinilah berawal dinasti / wangsa Kepakisan.

Akibat ketidak cakapan Raden Agra Samprangan menjadi raja, Raden Samprangan digantikan oleh Dalem Ketut Ngelusir. Oleh Dalem Ketut Ngelusir, pusat pemerintahan dipindahkan ke Gelgel. Pada saat inilah dimulai periode Gelgel dan Raja Dalem Ketut Ngelusir merupakan raja pertama. Raja yang kedua adalah Dalem Watu Renggong (1460-1550). Dalem Watu Renggong menaiki singgasana dengan warisan kerajaan yang stabil sehingga ia dapat mengembangkan kecakapan dan kewibawaannya untuk memakmurkan Kerajaan Gelgel. Di bawah pemerintahannya, Bali (Gelgel) mencapai puncak kejayaannya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Dalem Bekung (1550-1580), sedangkan raja terakhir dari zaman Gelgel adalah Dalem Di Made (1605-1686)

Kerajaan Klungkung sebenarnya merupakan kelanjutan dari dinasti Gelgel. Pemberontakan I Gusti Agung Maruti ternyata telah mengakhiri periode Gelgel. Hal itu terjadi karena setelah putra Dalem Di Made dewasa dan dapat mengalahkan I Gusti Agung Maruti, istana Gelgel tidak dipulihkan kembali. Gusti Agung Jambe sebagai putra yang berhak atas takhta kerajaan ternyata tidak mau betakhta di Gelgel, tetapi memilih tempat baru sebagai pusat pemerintahan, yaitu bekas tempat persembunyiannya di Semarapura. Dengan demikian Dewa Agung Jambe (1710-1775) merupakan raja pertama zaman Klungkung. Raja ke-dua adalah Dewa Agung Di Made I, sedangkan raja Klungkung yang terakhir adalah Dewa Agung Di Made II. Pada zaman Klungkung, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan kecil itu selanjutnya menjadi Swapraja (berjumlah delapan buah) yang pada zaman kemerdekaan dikenal sebagai kabupaten.

Kerajaan-kerajaan pecahan Klungkung :

1. Kerajaan Badung, yang kemudian menjadi Kabupaten Badung
2. Kerajaan Mengwi, yang kemudian menjadi kecamatan Mengwi
3. Kerajaan Bangli, yang kemudian menjadi Kabupaten Bangli
4. Kerajaan Buleleng, yang kemudian menjadi Kabupaten Buleleng
5. Kerajaan Gianyar, yang kemudian menjadi Kabupaten Gianyar
6. Kerajaan Karangasem, yang kemudian menjadi Kabupaten Karangasem
7. Kerajaan Klungkung, yang kemudian menjadi Kabupaten Klungkung
8. Kerajaan Tabanan, yang kemudian menjadi Kabupaten Tabanan
9. Kerajaan Denpasar, yang kemudian menjadi Kota Denpasar

Zaman Kolonial Belanda

Pada periode ini mulai masuk intervensi Belanda ke Bali dalam rangka “pasifikasi” terhadap seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Dalam proses yang secara tidak sengaja membangkitkan sentimen Nasionalisme Indonesia ini, wilayah-wilayah yang belum ditangani oleh administrasi Batavia dicoba untuk dikuasai dan disatukan. Belanda masuk ke Bali disebabkan beberapa hal : beberapa aturan kerajaan di Bali dianggap mengganggu kepentingan dagang Belanda, penolakan Bali untuk menerima monopoli yang ditawarkan oleh Batavia, dan permintaan bantuan dari warga pulau Lombok yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasanya (dari Bali).

Masa ini merupakan masa perlawanan terhadap kedatangan bangsa Belanda di Bali. Perlawanan-perlawanan ini ditandai dengan meletusnya berbagai perang di wilayah Bali. Perlawanan-perlawanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perang Buleleng (1846)
2. Perang Jagaraga (1848-1849)
3. Perang Kusamba (1849)
4. Perang Banjar (1868)
5. Puputan Badung (1906)
6. Puputan Klungkung (1908)

Dengan kemenangan Belanda dalam seluruh perang dan jatuhnya kerajaan Klungkung ke tangan Belanda, berarti secara keseluruhan Bali telah jatuh ke tangan Belanda. Sejak kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda, mulailah pemerintah Belanda ikut campur mengurus soal pemerintahan di Bali. Hal ini dilaksanakan dengan mengubah nama raja sebagai penguasa daerah dengan nama *Regent* untuk daerah Buleleng dan Jembrana serta menempatkan P.L.Van Bloemen Waanders sebagai *Controleur* yang pertama di Bali.

Struktur pemerintahan di Bali masih berakar pada struktur pemerintahan tradisional, yaitu tetap mengaktifkan kepemimpinan tradisional dalam melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah. Untuk daerah Bali, kedudukan raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang pada waktu pemerintahan Kolonial didampingi oleh seorang *Controleur*. Di dalam bidang pertanggung jawaban, raja langsung bertanggung jawab kepada Residen Bali-Lombok yang berkedudukan di Singaraja, sedangkan untuk Bali Selatan, raja-rajanya bertanggung jawab kepada Asisten Residen yang berkedudukan di Denpasar.

Zaman Kemerdekaan

Menyusul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 23 Agustus 1945, Mr. I Gusti Ketut Puja tiba di Bali dengan membawa mandat pengangkatannya sebagai Gubernur Sunda Kecil. Sejak kedatangan beliau inilah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Bali mulai disebarluaskan sampai ke desa-desa. Pada saat itulah mulai diadakan persiapan-persiapan untuk mewujudkan susunan pemerintahan di Bali sebagai daerah Sunda Kecil dengan ibukotanya di Singaraja. Sejak pendaratan NICA di Bali, Bali selalu menjadi arena pertempuran. Dalam pertempuran itu pasukan RI menggunakan sistem gerilya. Oleh karena itu, MBO sebagai induk pasukan selalu berpindah-pindah. Untuk memperkuat pertahanan di Bali, didatangkan bantuan ALRI dari Jawa yang kemudian menggabungkan diri ke dalam pasukan yang ada di Bali. Karena seringnya terjadi pertempuran, pihak Belanda pernah mengirim surat kepada Ngurah Rai untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi pihak pejuang Bali tidak bersedia, bahkan terus memperkuat pertahanan dengan mengikut sertakan seluruh rakyat.

Untuk memudahkan kontak dengan Jawa, Ngurah Rai pernah mengambil siasat untuk memindahkan perhatian Belanda ke bagian timur pulau Bali. Pada 28 Mei 1946, Ngurah Rai mengarahkan pasukannya menuju ke timur dan ini terkenal dengan sebutan "long march". Selama diadakan long march pasukan sering dihadang oleh tentara Belanda sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran yang membawa kemenangan bagi para pejuang adalah pertempuran Tanah Arun, yaitu pertempuran di sebuah desa kecil di lereng gunung Agung, kabupaten Karangasem. Dalam pertempuran tersebut yang terjadi 9 Juli 1946, pihak Belanda banyak menjadi korban. Setelah pertempuran itu pasukan Ngurah Rai kembali menuju barat yang kemudian sampai di desa Margarana (Tabanan). Untuk lebih menghemat tenaga karena terbatasnya persenjataan, ada beberapa anggota pasukan terpaksa disuruh berjuang bersama-sama masyarakat.

Pada waktu MBO berada di desa Marga, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi NICA yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada 18 November 1946 (malam hari) dan berhasil baik. Beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi NICA ikut menggabungkan diri kepada pasukan Ngurah Rai. Setelah itu pasukan segera kembali ke desa Marga. Pada 20 November 1946 sejak pagi-pagi buta tentara Belanda mulai mengadakan pengurangan terhadap desa Marga. Kurang lebih pukul 10.00 pagi mulailah terjadi tembak menembak antara pasukan NICA dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Oleh karena itu, Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali ditambah

pesawat pengebom yang datang dari Makasar. Di dalam pertempuran yang sengit tersebut semua pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan “puputan” atau perang habis-habisan di desa Margarana sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai. Dari pihak Belanda ada sekitar 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan perang puputan margarana, dan kini bekas arena pertempuran didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaa Bangsa.

Pada tanggal 7 sampai 24 Desember 1946, Konferensi Denpasar berlangsung di Pendopo Bali Hotel. Konferensi itu dibuka oleh Hubertus Johannes van Mook yang bertujuan untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibukota Makassar (Ujung Pandang). Dengan terbentuknya NIT itu susunan pemerintahan di Bali dihidupkan kembali seperti pada zaman raja-raja dulu, yaitu pemerintahan dipegang oleh raja yang dibantu oleh patih, punggawa, perbekel dan pemerintahan yang paling bawah adalah kelian. Disamping itu, masih ada lagi suatu dewan yang berkedudukan di atas raja, yaitu dewan raja-raja.

Agresi Militer yang pertama terhadap pasukan pemerintahan republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melancarkan lagi agresinya yang kedua 18 Desember 1948. Pada masa agresi yang kedua itu, di Bali terus-menerus diusahakan berdirinya badan-badan perjuangan bersifat gerilya yang lebih efektif. Sehubungan dengan hal itu, pada Juli 1948 dibentuk organisasi perjuangan dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GRIM) selanjutnya tanggal 27 November 1949, GRIM menggabungkan diri dengan organisasi perjuangan lainnya dengan nama Lanjutan Perjuangan. Nama itu kemudian diubah lagi menjadi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sunda Kecil. Sementara itu Konferensi Meja Bundar (KMB) mengenai persetujuan tentang pembentukan Uni Indonesia – Belanda dimulai sejak akhir Agustus 1949. Akhirnya 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RIS. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SISTEM KERAJAAN DAN ARSITEKTUR BALI

Pengertian Arsitektur & Arsitektur Bali

Suatu karya arsitektur hampir selalu disadari ataupun tidak, akan mencerminkan ciri budaya dan tata nilai dari kelompok manusia yang terlibat di dalam proses penciptaannya. Dengan demikian bila secara cermat dilakukan pengamatan pada karya arsitektur, maka lambat laun pasti akan dapat ditemu kenali ciri budaya dari masyarakatnya. Arsitektur adalah seni, ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan bangunan dan penciptaan ruang untuk kegunaan manusia. Sedang kalau ditinjau dari pendapat klasik yang dikemukakan oleh *Vitruvius*, disebutkan bahwasannya arsitektur terdiri dari 3 (tiga) unsur *Trinitas* terdiri dari : *Firmitas* (kekuatan / konstruksi), *Utilitas* (kegunaan / fungsi) dan *Venustas* (keindahan / estetika) yang disintesiskan menjadi arsitektur.

Disinilah letak uniknya arsitektur sebagai disiplin ilmu, yang harus merangkul tidak hanya teknologi tetapi juga seni. Manakala tugas ilmu adalah merumuskan hipotesis dan membuat teori baru, tugas teknologi memecahkan masalah teknis dan praktis secara elegan, efisien dan ekonomis, maka tugas seni adalah menciptakan karya-karya yang kreatif dan orisinal (*Eko Budihardjo, 1991*). Arsitektur adalah merupakan bagian integral dari pengembangan kebudayaan, maka seluruh perwujudannya merupakan hasil olah pikiran (logika), kemauan (etika) dan perasaan (estetika) dari manusia. Masalah kebudayaan adalah bersifat manusiawi dan duniawi, pengembangannya sangat tergantung pada kemampuan menggunakan akal dan budi daya untuk memanfaatkan seluruh isi alam semesta dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Suatu karya arsitektur yang baik, tentunya merupakan suatu hasil karya yang berakar dari perkembangan arsitektur yang terdapat di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini berarti bukanlah menghadirkan kembali bentuk fisik arsitektur masa lampau melainkan dapat dikembangkannya gagasan yang kreatif dan inovatif pada karya arsitektural masa kini ataupun esok. Penelusuran budaya lokal (tradisional) dalam perancangan arsitektural masa kini dan yang akan datang dapat dilakukan melalui :

- a. Iklim / Klimatologis, terutama yang terkait dengan prinsip penghawaan dan pencahayaan alami dalam gubahan tata ruang, tata rupa (fasade), orientasi, dan gubahan massa bangunan
- b. Kosmologi yang terkait dengan faktor geografi, geologi dan teritorial atau tempat perwujudan dari arsitektur
- c. Pemakaian bahan-bahan lokal yang dipadukan dengan penerapan teknologi mutakhir / kekinian

- d. Ungkapan unsur-unsur simbolik yang dimanifestasikan dalam gubahan tata ruang, wujud bangunan ataupun bentuk-bentuk ornamen dan dekoratif yang dapat menambah nilai-nilai estetika
- e. Penghargaan terhadap sistem religi, kepercayaan dan agama yang telah berkembang dan sangat dipercaya pada suatu masyarakat

Salah satu contoh dari arsitektur tradisional yang masih dapat dikatakan hidup adalah arsitektur Bali karena arsitekturnya memang merupakan refleksi religi dan budaya yang masih hidup pula. Ada pula daerah-daerah dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami perubahan-perubahan tata nilai, maka niscaya arsitektur tradisionalnya juga akan memudar bahkan pada saat tertentu akan ditinggalkan, sehingga lambat laun akan sirna. Pandangan bahwasannya arsitektur yang tradisional atau tidak, sangat tergantung pada masalah jarak dari rentang waktu yang cukup. Beberapa dasar pemikiran dari proses perwujudan arsitektur tradisional dapat disebutkan sebagai berikut (*Robi Sularto, 1983*) :

- a. Dilandasi *Kawruh* :
 - Merupakan ilmu yang memiliki berbagai dasar-dasar filsafat, ekologi, teknologi, estetika, tata laksana, tata ritual, sosiologi secara lengkap dan terperinci
 - Merupakan sarana untuk membentuk dan mengembangkan individu juga masyarakat dalam *kawruh* hidup
- b. Bagian dari *Dharma / Mission* :
 - Menciptakan wadah bagi kehidupan manusia yang utuh, selamat dan sejahtera dunia-akhirat
 - Memapankan manusia dalam dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa
- c. Perwujudan Tertib Laksana :
 - Mengukuhkan manusia sebagai subjek yang disertai dengan tanggung jawab dunia-akhirat
 - Menggugah dan melatih kemandirian, membangkitkan dan meningkatkan kesadaran pengetahuan serta ketrampilan.
 - Upaya-upaya mempertahankan ciri-ciri arsitektur lokal di Bali dilakukan hampir bersamaan dengan dibukanya Airport International di sekitar tahun 1970. Pengembangan airport dimaksudkan agar diperoleh kemudahan-kemudahan untuk menjawab perkembangan dan permintaan *Tourism* dari manca negara yang ingin berkunjung ke Bali. *Booming* tersebut ditanggapi dengan dikembangkannya konsep *Pariwisata – Budaya*, maksudnya adalah menjadikan budaya Bali sebagai *back bone* dari daya tarik ataupun sebagai objek-objek wisata. Sudah barang tentu hal ini akan terkait dengan arsitekturnya. Salah satu *building codes* yang muncul

adalah peraturan tentang tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa (maksimal 15 meter), corak / style bangunan mencerminkan arsitektur Bali, penggunaan bahan-bahan lokal / alam, variasi bentuk tumpang pada bagian atap maksimal seperti typologi bangunan *bale banjar* ataupun *wantilan* dan tidak boleh memakai bentuk *meru*, yang membedakan bangunan sakral dan profan.

- Disamping peraturan yang mengikat dan diterapkan secara konsekuen tanpa pandang bulu, masyarakat Bali juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius. Mereka sangat patuh pada ajaran-ajaran agama dan mempunyai adat istiadat yang begitu kuat dan mengakar pada kehidupan. Unsur religi dan adat dimanifestasikan dalam proses kehidupan sehari-hari, mulai saat membuka mata di pagi hari sampai dengan menutup mata di malam hari. Dapat dikatakan bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali selalu dijiwai dan dituntun dengan prinsip-prinsip religi dan adat.
- Tidaklah mengherankan bila dengan tingkat kemajuan taraf penghidupan dan tingkat perekonomian yang dimotori oleh *tourism*, budaya Bali dan style arsitektur Bali bukannya semakin menghilang, tetapi justru semakin dapat dirasakan kekuatannya dari waktu ke waktu. Style arsitektur Bali tidak hanya dipertahankan pada bangunan *Parahyangan* (pura / religi) saja, melainkan juga pada bangunan *Palemahan* (rumah tinggal) ataupun *Pawongan* (bangunan umum) mulai dari tingkat kepentingan masyarakat adat seperti *Bale Banjar* dan *Wantilan*, juga meluas sampai bangunan perkantoran, perdagangan, restaurant, museum, rekreasi, hotel-hotel dan sebagainya.

Arsitektur Bali Zaman Kerajaan

Pada zaman Bali Kuno masih sulit memastikan peninggalan-peninggalan arsitektur, yang terlihat masih berupa tempat-tempat pertapaan di tebing-tebing sungai atau di bukit dan berupa patung seperti : Gua Gajah, Telaga Wajah, arca-arca batu padas yang terdapat di Bukit Penulisan dan juga di tempat-tempat lain lingga-lingga batu padas dan sebagainya. Bentuk-bentuk perumahan masih sulit ditentukan, tetapi dapat dipastikan sudah ada suatu pola tertentu karena sudah ada susunan masyarakat yang teratur beserta pemerintahan Bali Kuno misalnya : Tawan, Tirip, Samogat, Hulu dan sebagainya seperti yang disebutkan di dalam prasasti-prasasti Bali Kuno.

a. Sebelum Datangnya Empu Kuturan di Bali

Situasi yang demikian ini memberikan petunjuk bahwa pada masa itu sudah ada pola Keraton, Pola Perumahan para Pejabat Pemerintahan dan pola menetap bagi rakyat. Hal

ini dapat dibandingkan, bahwa prakiraan tidak jauh berbeda dengan pola keraton atau pola perumahan pada masa yang berikutnya, karena pengaruh Hindu yang masuk ke Bali diperkirakan pada abad permulaan Tahun Masehi. Dari bukti-bukti yang diperoleh memberikan gambaran, bahwa pusat-pusat keraton pada zaman Bali Kuno adalah di pegunungan di daerah sekitar Kintamani seperti Balingkang di dekat Bukit Penulisan dan Singamandawa yang diperkirakan juga ada di sekitar daerah yang sama dan daerah sekitar Pejeng – Bedulu.

Suatu kenyataan yang dijumpai sekarang, bahwa sebagian besar bentuk-bentuk perumahan rakyat secara tradisional di daerah pegunungan sekitar Kintamani yang sulit aksesibilitasnya pada saat itu seperti : Pinggan, Trunyan, Sekawana, Caningan, Buah dan lain sebagainya, bentuk-bentuk perumahannya merupakan bangunan tertutup yang terbuat dari kayu dan bambu (dinding dan atapnya dari bambu) Bangunan ini berfungsi selain sebagai ruang tidur bagi semua anggota keluarga, juga dapur dan ruang untuk menyimpan barang-barang. Letak bangunan dan batas-batas pekarangannya belum teratur, ada yang letaknya berderet-deret dan ada pula yang letaknya tidak beraturan (berserakan).

Bangunan-bangunan suci masih merupakan onggokan-onggokan batu yang di atasnya sering terdapat lingga diletakkan di atas bukit atau pada tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Pada akhir zaman ini mulailah dibuat tempat-tempat pertapaan pada tebing sungai atau bukit seperti : Gua Gajah, Gua Gunung Kawi, Telaga Waja yang mengikuti gaya Jawa Timur (abad ke 10-11). Selain itu juga ditemukan arca-arca Ganesha dan Lingga dari batu padas. Pada zaman ini pula belum diketahui adanya istilah "Pura" dan "Puri", yang ada istilah "Kedatuan" yang artinya tempat Datu atau Cri, misalnya : Cri Mayadenawa Akadatuan ing Balingkang".

b. Datangnya Empu Kuturan di Bali

Pada zaman pemerintahan Raja Airlangga di Jawa Timur (1019-1042), datanglah Empu Kuturan ke Bali. Beliau mengajarkan dasar-dasar penciptaan "Parahyangan" atau "Kahyangan Dewa" yang menunjukkan tempat "Hyang" atau "Dewa" yang berfungsi sebagai tempat suci (Pura) di Bali seperti halnya yang ada di Jawa Timur. Kata "Pura" berasal dari kata "Pur" yang berarti suatu tempat yang dikelilingi oleh pagar / tembok atau juga berarti benteng, kota, rumah. Datangnya Empu Kuturan ke Bali membawa perubahan besar di dalam tata kehidupan masyarakat. Beberapa ajarannya yang mengacu pada "Wismakarma" dan "Hastakosali" antara lain : membuat Sad Kahyangan, memperbesar

Pura Besakih, membuat Kahyangan Tiga pada tiap-tiap desa adat. Pada masa ini juga mulai dibuat typologi bangunan pelinggih di pura seperti : Meru, Gedong, Pengaruman, Piasan dan bentuk-bentuk bangunan suci lainnya kecuali Padmasana.

Pola perumahan masyarakat (Pawongan) juga mulai diterapkan menurut petunjuk lontar Hastakosali yang dikombinasikan dengan model rumah pada zaman sebelumnya. Dengan demikian terjadilah suatu penggabungan arsitektur model perumahan diantaranya dapat dijumpai di desa Pengotan, Sekardadi, Tiga, Tenganan dan sebagainya yang ragamnya berbeda dengan bangunan perumahan sesudah kedatangan orang-orang Majapahit di daerah Bali Dataran.

c. Arsitektur Puri/Keraton di Bali

Patih Gajah Mada yang disertai oleh para "Arya"/panglima-panglima perang, berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1343. Ditunjuklah Sri Kresna Kepakisan sebagai raja yang berkuasa di Bali, yang mula-mula menempati keraton di Samprangan (Gianyar) dan selanjutnya oleh penerusnya keraton dipindahkan ke Gelgel dan akhirnya ke Klungkung. Dinasti Sri Kresna Kepakisan inilah yang membawa pola tata kehidupan dari Majapahit ke Bali dan diterapkan secara menyeluruh dalam segi-segi kehidupan masyarakat di Bali. Secara umum beliau belum dapat menerapkannya secara lengkap dan baik, karena dalam masa pemerintahannya masih sering terjadi pemberontakan dari bekas kerajaan-kerajaan Bali Kuno.

Penggantinya adalah Dalem Waturenggong (abad ke-16) yang berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Lombok, Sumbawa dan Blambangan (Jawa Timur), hal ini adalah merupakan masa keemasan dinasti Sri Krisna Kepakisan di Bali. Banyak produk seni dan budaya yang berkembang pada saat itu diantaranya seni sastra, penulisan lontar tentang ajaran agama Hindu, seni tabuh (gong), seni tari (Gambuh dan Topeng), tata cara "Ngaben", dan lain sebagainya. Keraton-keraton dari permulaan dinasti Sri Kresna Kepakisan masih memakai istilah "Pura" seperti : keratonnya di Samprangan (Gianyar) bernama "Linggarsa Pura", keratonnya di Gelgel bernama "Sweca Pura" dan keratonnya di Klungkung bernama "Semara Pura". Istilah "Puri" yang dipergunakan untuk fungsi keraton terjadi setelah beberapa dinasti berkuasa di Klungkung. Hal ini dilakukan untuk membedakan kata "Pura" yang berfungsi sebagai tempat persembahyangan / tempat suci dan kata "Puri" yang berfungsi tempat tinggal raja.

Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong datanglah ke Bali Dang Hyang Nirartha / Dang Hyang Dwijendra atau juga terkenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawu Rawuh, seorang Pendeta sekaligus Sastrawan besar dari Jawa Timur. Banyak peninggalan yang dibuat diantaranya Pura Pantai seperti : Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, Pura Tanah Lot, Pura Peti Tenget, Pura Ulu Watu, Pura Sakenan, Pura Air Jeruk dan sebagainya. Penyempurnaan yang dilakukannya untuk bangunan Kahyangan adalah pembuatan pelinggih “Padmasana” untuk sthana Sang Hyang Widhi. Padmasana artinya : teratai sebagai tempat duduk para Dewa. Baik Empu Kuturan maupun Dang Hyang Nirartha mengajarkan bahwa pemilihan lokasi untuk mendirikan Pura didasarkan pada intuisi yang diperoleh dalam “Samadhi” dan proses pembuatannya mengikuti petunjuk sastra seperti : Hastakosali, Janantaka, Wismakarma, Padmabhumi dan lain sebagainya. Sedangkan pembuatan patung-patung sebagai ornamen mengikuti petunjuk-petunjuk clipa-sastra. Penggunaan adegan-adegan di dalam relief-relief diambil dari cerita mitologi yang sesuai dengan fungsi Pura.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan dan Pengaruhnya Terhadap Arsitektur Bali didapat beberapa hasil kesimpulan. Negara klasik disebut dengan istilah *Indic* (berkenaan dengan India) atau *Indianized*, adalah menjadikan India dalam penampilan, adat atau sifat, atau Hindu-Budhis dari segi agama yang dianut merupakan ciri-ciri yang mendominasi perwujudan negara-negara kerajaan di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Sistem pemerintahan kerajaan di Bali berawal dari sejak zaman Bali Kuno sampai dengan zaman Awal Kemerdekaan. Puncak kejayaannya terjadi pada zaman Majapahit atau setelah adanya ekspedisi patih Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali. Dinasti raja-raja dan masyarakat dengan kelas Kasta (Brahmana, Ksatria, Weisya dan Sudra) di Bali adalah keturunan Majapahit

Pengaruh agama Hindu, terutama setelah kedatangan Pendeta dari Jawa Timur : Empu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha / Dang Hyang Dwijendra sangat mendominasi pada perkembangan dan perbaikan segi-segi kehidupan dan sistem pemerintahan kerajaan di Bali, termasuk pada perkembangan arsitektur yang dapat dikategorikan menjadi bangunan Kahyangan, Pawongan dan Palemahan. Pada mulanya keraton di Bali disebut dengan “Pura” seperti : Linggarsa Pura (Samprangan, Gianyar), Sweca Pura (Gelgel) dan Semara Pura (Klungkung), setelah beberapa generasi kekuasaan di Klungkung dilakukan perubahan sebutan : Pura untuk fungsi bangunan Kahyangan / Suci dan Puri untuk fungsi bangunan Pawongan / Keraton. Setelah zaman Kemerdekaan dengan terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuklah sistem pemerintahan yang baru dengan Presiden sebagai pemimpinya, mengakibatkan lemahnya kekuasaan raja-raja di Bali.

REFERENSI

- Abu, Rivai. (1980). **Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali**, Denpasar : Depdikbud.
- Agung, Ide Anak Agung Gede. (1989). **Bali Pada Abad XIX**. Gama Press, Yogyakarta.
- Agung, Ide Anak Agung Gede (1993). **Kenangan Masa Lampau Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali**. Yayasan Obor, Jakarta.
- Anderson, Benedict R.O.G. (1972). **The Idea Of Power in Javanese Culture**. Cornel University Press, London.
- Behrend, Timothy Earl. (1982). **Keraton and Cosmos in Traditional Java**. Thesis, University of Wisconsin.
- Budihardjo, Eko. (1983). **Menuju Arsitektur Indonesia**. Alumni, Bandung.
- Budihardjo, Eko. (1991). **Jati Diri Arsitektur Indonesia**. Alumni, Bandung.
- Budihardjo, Eko. (1986). **Architectural Conservation in Bali**. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budihardjo, Sf.Rachmat. (1997). **Konservasi Puri-Puri Di Bali**. Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Teknik – Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budihardjo, Sf.Rachmat. (1994). **Perubahan Fungsi dan Tata Ruang Puri Di Bali (Suatu Kajian Sejarah Sosial)**. Thesis Program Pasca Sarjana, Program Studi Perancangan Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Covarubias, Miguel. (1973). **Island of Bali**. KPI Limited, London.
- Dumarcay, Jaques. (1991). **The Palaces of South East Asia Architecture and Customs**. Oxford University Press, Singapore.
- Eisenmen, Fred B. (1981). **Bali Sekala and Niskala**. Periplus Edition, Singapore.
- Geertz, Clifford. (1977). **Form and Variation in Balinese Village Structure**. American Anthropologist Vol.61 No.6.
- Geertz, Clifford. (1959). **Centres, Kings and Charisma Reflection on Symbolics of Power (Culture and Its Creatures)**. University of Chicago Press, Chicago.
- Geertz, Clifford. (1992). **Kebudayaan dan Agama**. Kanisius, Yogyakarta.
- Geertz, Clifford. (1992). **Politik Kebudayaan**. Kanisius, Yogyakarta.
- Geertz, Clifford. (1992). **Tafsir Kebudayaan**. Kanisius, Yogyakarta.
- Geertz, Hildred. (1991). **State and Society in Bali**. KITLV, Leiden.

- Gelebet, I Nyoman, et.al. (1986/87). **Arsitektur Tradisional Daerah Bali**. Depdikbud, Denpasar.
- Gesick, Lorraine. (1989). **Pusat, Simbol dan Hirarkhi Kekuasaan**. Yayasan Obor, Jakarta.
- Hobart, Mark. (1976). **The Legitimacy of Nature in Balinese Conception of Space**. University of London, London.
- Kagami, Haruya. (1988). **Balinese Traditional Architecture in Process**. Nippon Printing, Japan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). **Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial**. LP3ES, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono et.al. (1993). **Perkembangan Peradaban Priyayi**. Gama Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1990). **Pengantar Ilmu Anthropologi**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Laksono, P.M. (1985). **Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan**. Gama Press, Yogyakarta.
- Mabett, I.W. (1969). **Deva-Raja**. Asian History.
- Mangunwijaya, YB. (1988). **Wasthu Citra**. Gramedia, Jakarta.
- Ngoerah, I Gusti Ngoerah Gde et.al. (1981). **Arsitektur Tradisional Bali**. Lembaga Penerbitan UnHas, Makassar.
- Ngurah, I Gusti Ayu. (1983). **Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan di Bali Dalam Masa Persekutuan Pada Abad Ke XIX**. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali.
- Nordhoff, Henk Schulte. (1981). **Negara. A Theatre State 2**.
- Parimin, Ard Pardiman. (1986). **Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village**. Thesis Tokyo University, Japan.
- Patra, I Made Susila. (1985). **Hubungan Seni Bangunan Dengan Hiasan Dalam Rumah Adati Bali**. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rapoport, Amos. (1969). **House Form and Culture**. Engelwood Cliffs, New York.
- Salya, Yuswadi. (1975). **Spatial Concept in Balinese Traditional Architecture Its Possible For Further Development**. Thesis, Hawaii University.
- Sastrowardoyo, Robi Sularto. (1987). **Traditional Architecture of Bali**. Makalah Aga Khan Award, Bali.
- Sneyder, James C. (1991). **Pengantar Arsitektur**. Erlangga, Jakarta.
- Tjahyono, Gunawan, et-al. (1998). **Indonesian Heritage Architecture**. Archipelago Press, Singapore.
- Van Wouden, F.A.E. (1985). **Klen, Mitos dan Kekuasaan**. Grafiti Pers, Jakarta.
- Vickers, Adrian. (1989). **Bali A paradise Created**. Periplus Edition, Berkeley, California.
- Wiryomartono, A.Bagoes P. (1995). **Seni Bangunan dan Seni Bina Kota Di Indonesia**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.